

Jurnal Pijar Studi Manajemen dan Bisnis

<https://e-journal.naureendition.com/index.php/pmb>

Vol. 1 No. 2, 2023, Hal. 223 - 231

ISSN 2963-0606 (Online)

ISSN 2964-9749 (Print)

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN DI BUMDES MASKUMAMBANG

Angelina Nadia Saputra¹, Firdha Ayu Anggraeni², Mitha Dwi Restuti³
^{1,2,3} Universitas Kristen Satya Wacana

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan BUMDes dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel di BUMDes Maskumambang. Laporan keuangan yang disusun BUMDes Maskumambang masih sederhana, disusun secara rapi, pencatatan transaksi dimasukkan secara rinci. Pengetahuan mengenai akuntansi yang kurang luas dapat menyebabkan terjadinya ketidakakuratan laporan keuangan yang menimbulkan kendala dalam mengelola keuangan BUMDes. Kajian ini diperoleh melalui wawancara dengan pengurus yang bertanggung jawab dalam mengelola laporan keuangan dan produksi BUMDes. Data yang terkumpul direduksi dan dianalisis kembali untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan teknik analisis triangulasi data. Hasil penelitian menyatakan bahwa adanya beberapa kendala yang dialami oleh BUMDes Maskumambang yaitu dalam melakukan penentuan harga produk dan laporan keuangan yang disusun tidak mengikuti kriteria standar akuntansi. Selain itu, terdapat program kerja yang belum terlaksana yang mengakibatkan terhambatnya hasil pelaporan laporan keuangan karena belum dapat memberikan informasi yang sesuai. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengelolaan laporan keuangan dinilai kurang akuntabel bagi pihak yang membutuhkan. Berdasarkan penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana evaluasi bagi pihak BUMDes Maskumambang, selain itu bisa dijadikan bahan kajian ilmu untuk menambah wawasan mengenai akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan di BUMDes.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Laporan Keuangan, BUMDes

Alamat Korespondensi
232019038@student.uksw.edu

Pendahuluan

BUMDes merupakan salah satu penopang kegiatan perekonomian desa yang memiliki fungsi sebagai institusi sosial, BUMDes berperan sebagai penyedia layanan sosial bagi kepentingan masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat (Syah, 2020). Selain itu, BUMDes juga berperan sebagai institusi komersial yang berorientasi untuk mendapatkan laba atau keuntungan melalui unit-unit usaha yang menawarkan produk berupa barang bahan mentah atau barang jadi serta berupa jasa guna meningkatkan pertumbuhan dari pendapatan asli desa yang diperoleh dari usaha BUMDes (Wulandari, 2021). BUMDes juga merupakan organisasi yang menjalankan prinsip efektivitas dan efisiensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Deke, 2019).

Menurut kementerian keuangan pada tahun 2021 terdapat sebanyak 57.273 dimana 45.233 merupakan BUMDes aktif dan 12.040 merupakan BUMDes yang tidak aktif, dengan adanya pendirian BUMDes ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah dan membantu perekonomian masyarakat setempat. Tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) yaitu PP No 11 Tahun 2021 yang mengatur mengenai pendirian BUMDes, anggaran dasar sampai perencanaan program kerja. Menurut Widhianingtyas et al., (2018) menyatakan bahwa optimalnya pengelolaan pada usaha yang dimiliki BUMDes ditunjukkan dengan adanya transparansi pada laporan keuangan dan memiliki sifat akuntabilitas dapat membantu perencanaan usaha yang ada di BUMDes lebih bersifat berkelanjutan, namun pada kenyataannya terdapat cukup banyak tantangan yang dihadapi dalam mengelola BUMDes seperti kurangnya pengalaman yang dimiliki pada bidang akuntansi. Sesuai yang disampaikan oleh Kirendya, (2017) yaitu belum semua BUMDes yang telah didirikan dapat memberikan hasil yang optimal terhadap pengelolaan usaha yang dilakukan.

Permasalahan yang biasa terjadi pada Akuntabilitas di BUMDes pada pengelolaan keuangan BUMDesnya, pengelolaan keuangan BUMDes masih banyak yang belum bisa memberikan laporan pertanggungjawabannya terhadap pihak-pihak yang membutuhkan, seperti masyarakat dan beberapa pihak terkait lainnya (Purba et al., 2021). Ada juga pengelolaan keuangan BUMDes yang belum bisa membuat laporan keuangan BUMDesnya sesuai dengan Standar Akuntansi- Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang berlaku dan juga laporan keuangan BUMDes yang seharusnya. Pengelolaan keuangan yang baik menjadi perihal yang sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BUMDes, karena dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel, masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana pemerintah desa yang disalurkan kepada BUMDes (Rindi et al., 2017). Menurut pendapat peneliti menyatakan bahwa BUMDes sebagai badan usaha yang memiliki identitas khusus dan merupakan lembaga yang berdasarkan hukum, artinya penerapan akuntansi hingga laporan keuangan yang disajikan harus memiliki kepercayaan dari semua pihak dan bisa dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan guna pengambilan keputusan.

penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akuntabilitas BUMDes Maskumambang dalam pengelolaan laporan keuangan. BUMDes Maskumambang yang berada di Desa Kemambang, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang. Pelaporan BUMDes Maskumambang dikelola langsung oleh pengurus. Selama ini BUMDes hanya melakukan pencatatan sederhana dan sudah dilakukan memakai Microsoft Excel. Pencatatan hanya meliputi pendapatan akhir yang didapatkan dari penjualan saja dan bentuk pengeluaran operasional masih dicatat secara manual pada buku pencatatan kas (Wulandari, 2021). Pencatatan keuangan yang masih sangat sederhana menyebabkan berbagai macam masalah pada pada proses pengambilan keputusan dan mengalami kegagalan dalam melaksanakan program yang telah direncanakan, sehingga BUMDes ini memerlukan informasi keuangan secara cepat dan sempurna, sehingga harapannya BUMDes Maskumambang ini dapat membentuk pencatatan keuangan dengan lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan guna melihat prospek BUMDes di masa depan (Puspitasari, 2020). Sisi akuntabilitas dari pihak BUMDes yaitu melakukan peralihan dengan pasti dan terstruktur dari laporan keuangan sebelumnya yang hanya terdiri dari laporan laba rugi dan laporan neraca

sedangkan saat ini pihak BUMDes telah melakukan kemajuan dalam melengkapi laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi seperti adanya laporan perubahan ekuitas BUMDes. Pertanggungjawaban dalam mengelola laporan keuangan masih dikelola oleh Bapak A sebagai pihak yang membuat laporan keuangan tersebut.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas tata kelola dalam suatu organisasi yang melayani masyarakat, di dalam penelitian ini organisasi yang dimaksud adalah BUMDes. Indikator akuntabilitas disini adalah bentuk pertanggungjawaban berdasarkan laporan keuangan mulai dari proses pembuatan pembukuan berdasarkan akuntansi hingga sampai dengan melihat bagaimana pengelolaan BUMDes dari segi ekonomi, efektivitas, dan efisiensi yang dituangkan dalam laporan keuangan BUMDes (Mahmudah, 2019). Diharapkan dengan adanya pertanggungjawaban atas laporan keuangan ini bisa menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga perkembangan BUMDes ini dengan mengukur sejauh mana keakuratan akuntabilitas dari sisi laporan keuangan.

Akuntabilitas sangatlah penting bagi BUMDes untuk pengelolaan guna menjaga kepercayaan masyarakat di sekitar BUMDes tersebut dan menghindari adanya tindakan kecurangan karena BUMDes bergerak dalam pengelolaan aset desa. Prinsip akuntabilitas ini memfokuskan pada pertanggungjawaban dari suatu proses yang menghasilkan aktivitas maupun program yang dilaksanakan oleh BUMDes yang dilihat dari sisi laporan keuangannya (Ayu Ariski & Asim Asy, 2019).

Beberapa fungsi akuntabilitas menurut peneliti Mahmudah, (2019) :

1. Alat Kontrol Tugas, Akuntabilitas sebagai acuan keberhasilan untuk mencapai tujuan seorang pimpinan dan sebagai media pertanggungjawaban selama menjalankan program yang telah direncanakan dari pimpinan kepada bawahannya.
2. Menekan Angka Penyalahgunaan Tugas, Melalui laporan pertanggungjawaban atas laporan keuangan pimpinan dapat melihat potensi adanya penyalahgunaan di dalam suatu organisasi.
3. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kinerja, Akuntabilitas dapat membantu pimpinan sebagai acuan evaluasi kinerja karyawan.

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban individu atau anggota organisasi BUMDes untuk mengelola sumber daya publik yang dimiliki oleh BUMDes dan dapat dipertanggungjawabkan yang berhubungan dengan kontrol, manajemen dan program kerja BUMDes. Pasal 3 Undang-Undang No 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan terlaksana nya program atau rencana dalam pengembangan BUMDes (Syah, 2020).

Konsep Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan menurut Handayani, (2020) yaitu pengelolaan keuangan dapat didefinisikan sebagai aktivitas mengelola keuangan suatu organisasi yang berhubungan dengan upaya mencari dan menggunakan dana secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan organisasi. Peneliti Rindi et al., (2017) mengungkapkan ruang lingkup pengelolaan keuangan berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian dan pengendalian sumber daya keuangan.

Berdasarkan UU No.17 Tahun 2003 dikatakan bahwa ketentuan prinsip pengelolaan keuangan negara atau daerah harus dikelola secara tertib pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Prinsip ini mencakup semua keseluruhan dalam kegiatan perencanaan, penugasan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan (Mahmudah, 2019).

Menurut Purba et al., (2021) menyatakan terdapat beberapa fungsi pengelolaan keuangan, sebagai berikut :

1. Perencanaan Keuangan dan Anggaran (*Budgeting*) Segala kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dana perusahaan yang digunakan untuk segala aktivitas dan kepentingan perusahaan. Dengan perencanaan dan pertimbangan yang matang memaksimalkan keuntungan dan minimalisasi anggaran yang sia-sia tanpa hasil.
2. Pengendalian (*Controlling*) Berhubungan dengan tindak pengawasan dalam segala aktivitas dalam manajemen keuangan, baik dalam penyalurannya maupun pada pembukunya yang untuk selanjutnya dilakukan evaluasi keuangan yang bisa dijadikan acuan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan selanjutnya.
3. Pemeriksaan (*Auditing*) Segala pemeriksaan internal yang dilakukan demi segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan manajemen keuangan memang telah sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan.
4. Pelaporan (*Reporting*) Dengan adanya manajemen keuangan, maka setiap tahunnya akan ada pelaporan keuangan yang berguna untuk menganalisis rasio laporan laba dan rugi perusahaan.

BUMDes

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menyatakan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya terdapat kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU No.6 tahun 2014 mengenai pengertian BUMDes yaitu salah satu badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa dari kekayaan langsung yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakatnya (Deke, 2019).

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha yang dimiliki oleh desa yang dikelola oleh pemerintah daerah bersama masyarakat setempat dengan tujuan memperkuat perekonomian desa dengan mengelola sumber daya yang dimiliki. BUMDes diharapkan dapat menciptakan otonomi sendiri dan mampu meningkatkan pendapatan asli yang diperoleh dari desa itu sendiri (Wulandari, 2021).

Metode

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang dilakukan pada BUMDes Maskumambang. Subjek dari penelitian ini adalah Ketua BUMDes dan pihak pengurus dalam pembukuan laporan keuangan. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah penerapan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan BUMDes Maskumambang. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan khusus diantaranya BUMDes Maskumambang merupakan salah satu BUMDes yang masih aktif beroperasi di Kabupaten Semarang dan mulai dikelola pada tahun 2018 sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui metode wawancara dan observasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu hasil dokumentasi berupa laporan keuangan BUMDes Maskumambang pada tahun 2021.

Awal dari pendirian BUMDes bermula dari keinginan para perangkat desa untuk mengembangkan dan mengenalkan hasil masyarakat Desa Kemambang yaitu kopi. Tujuan dibentuknya BUMDes Maskumambang yaitu sebagai wadah usaha yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Sejak awal berdiri sampai dengan tahun 2022 perjalanan operasional BUMDes Maskumambang mulai dari pembelian kopi ose dari kelompok tani, di roasting, kemudian dihaluskan menjadi bubuk, dikemas

dan dipromosikan. Beberapa aset yang selama ini digunakan BUMDes yaitu terdapat mesin grinder, mesin roasting, alat penyortir jenis kopi (Puspitasari, 2020).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian, analisis data dan penarikan kesimpulan (Hanifah & Rosikhoturrofifah, 2021). Pada tahap reduksi data hasil wawancara dikelompokkan berdasarkan persoalan penelitian, kemudian akan mengeliminasi jawaban yang kurang sesuai dengan fokus penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan pada BUMDes Maskumambang. Setelah itu, data yang sudah direduksi akan disajikan untuk dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan teori dan konsep yang dikembangkan. Selain itu, dalam melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan data hasil wawancara maupun studi dokumentasi. Tahap terakhir yaitu melakukan penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas persoalan penelitian. Cara peneliti dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes yaitu dengan melihat program yang telah direncanakan sebelumnya sudah terlaksana atau belum terlaksana, selain itu terkait penyusunan laporan keuangan sudah dapat dipahami dan dipercaya oleh masyarakat dengan penyusunan sesuai PSAK yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan BUMDes Maskumambang

Desa Kemambang merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Lokasi desa yang berada di lereng gunung membuat sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Ketika berkunjung ke Desa Kemambang akan ditemui banyak pohon kopi di sepanjang jalan. Setiap musim panen terdapat begitu banyak kopi yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Kemambang. Berlimpahnya hasil panen kopi menjadi salah satu faktor pendukung pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maskumambang. Para Perangkat Desa Kemambang berkeinginan untuk bisa memasarkan produk kopi petani lokal menuju cakupan konsumen yang lebih luas lagi. Selain bisa mengenalkan kopi sebagai produk khas Desa Kemambang, melalui pendirian BUMDes ini juga diharapkan bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Akhirnya pada 16 Januari 2018 secara resmi didirikan BUMDes Maskumambang.

Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Maskumambang

Pada tahun 2021 pelaporan laporan keuangan belum sesuai dengan SAK ETAP dikarenakan laporan pada tahun tersebut masih terdiri laba rugi dan neraca sehingga pihak yang bertanggung jawab pada Bumdes belum bisa memperoleh laporan keuangan secara utuh. Pada tahun 2022 pelaporan keuangan sudah mulai sesuai dengan SAK ETAP karena isi laporan keuangan pada tahun tersebut sudah terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan ekuitas. SAK ETAP ini tepat digunakan untuk BUMDes karena menggunakan dana pemerintah dan masyarakat sebagai modal usahanya. Sehingga butuh laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk dipertanggungjawabkan ke pihak terkait (Setiawan et al., 2021). Selain itu, SAK ETAP mengharuskan setiap BUMDes dengan pembuatan laporan keuangan minimum terdiri dari: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan (Setiawan et al., 2021). Salah satu contoh BUMDes yang telah menggunakan SAK ETAP yaitu BUMDes Langkitin di Riau.

Pembukuan yang dilakukan oleh Bapak A pada tahun sebelumnya hanya terdiri dari jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan laba rugi. Laporan posisi keuangan atau neraca untuk menampilkan aset, liabilitas, dan ekuitas secara utuh belum disusun oleh BUMDes Maskumambang. Tidak ada pembuatan jurnal penutup setiap periodenya yang membuat akun nominal tetap masih ada antara periode 1 dengan yang lain. Ini menjadi penyebab sulitnya

menyusun laporan keuangan untuk setiap periode dan hampir selalu mengalami ketidakseimbangan atau *imbalance*. Tidak adanya jurnal penutup berdampak pada perubahan nilai ekuitas dan penentuan saldo awal pada setiap akun. Adapun wawancara kepada pengelola laporan keuangan BUMDes mengenai pembukuan yang dilakukan BUMDes Maskumambang pada tahun sebelumnya sebagai berikut:

“Pembukuan yang saya lakukan masih menggunakan acuan ketika saya masih menduduki di bangku SMK dan saya juga melakukan belajar mandiri hanya dengan melihat tutorial yang ada di *YouTube* saja.”

Pernyataan di atas diungkapkan oleh Bapak A pengurus BUMDes yang memiliki tanggungjawab dalam melakukan pembukuan keuangan BUMDes Maskumambang. Karena pengetahuan mengenai pembukuan dengan standar akuntansi kurang luas, maka dalam perincian laporan keuangan BUMDes Maskumambang memunculkan kendala lain yaitu terkait perhitungan biaya produksi. Lalu, pada tahun 2022 Bapak A telah melengkapi pembuatan laporan ekuitas bagi BUMDes untuk memudahkan BUMDes dalam melihat perkembangan modal dari awal berdiri hingga pada tahun tersebut.

Kendala lain di tahun sebelumnya pada proses produksi yang dikelola oleh Bapak B memiliki dasar perhitungan biaya produksi yang sederhana. Biaya yang timbul akan dikomunikasikan kepada Bapak A untuk dilakukan pencatatan. Hingga saat ini biaya harga pokok produksi (HPP) masih menggunakan angka yang sama berdasarkan pengalaman historis yakni sejumlah Rp 57.500 per kilogram bubuk kopi. Biaya yang dimuat pada akun HPP juga terdapat biaya-biaya seperti gaji karyawan, listrik, gas, dan biaya lain yang digolongkan sebagai *overhead*. Biaya - biaya tersebut juga dilaporkan pada laporan laba rugi beserta dengan HPP sebagai biaya periodik. Hal ini menjadi fenomena *double counting* atau perhitungan ganda. Berdampak pada nilai laba yang akan lebih kecil akibat adanya perhitungan biaya berganda. Namun pada tahun 2022 Bapak A telah mencoba untuk memahami cara menentukan HPP dengan benar, sehingga laporan keuangan HPP yang dibuat dapat lebih tepat dalam menentukan laba yang diperoleh BUMDes. Adapun bukti hasil wawancara bersama dengan Bapak A pada tahun sebelumnya sebagai berikut:

“Sebenarnya saya masih kesulitan dalam menentukan harga pokok produk dari penjualan kopi ini dan kesulitan dalam menyusun neraca karena tidak *balance*, sehingga selama ini kami memutuskan untuk memiliki patokan harga pokok produk sejumlah Rp 57.500 per kilogram bubuk kopinya dan jika masih tidak imbang maka saya akan menyeimbangkan nominalnya dengan merombak angkanya lagi dari buku besar agar di laporan neraca nominalnya bisa imbang.”

Dilihat dari sudut pandang program yang peneliti temukan salah satunya mengenai akuntabilitas di BUMDes Maskumambang yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan ada salah satu program di BUMDes ini yaitu mengenai pengemasan produk kopi dengan menggunakan mesin *press* otomatis tetapi sampai saat ini masih dilakukan secara manual sehingga jangka waktu kadaluarsa produk tidak bertahan lama, alasan dari program tersebut belum terlaksana yaitu harga kemasan produk yang cukup mahal sedangkan perolehan pendapatan BUMDes yang belum bisa mencapai target. Dengan adanya program yang belum terlaksana dapat menghambat hasil pelaporan laporan keuangan yang belum bisa dibuat secara lengkap sehingga akan mempengaruhi pertanggungjawabannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Program kerja yang sudah terlaksana di BUMDes ini yaitu penjualan kopi, jasa *roasting* kopi, dan pembukuan. Selain itu terdapat juga program kerja yang belum dapat terlaksana lainnya seperti masih terhambat dalam mencapai perencanaan berkaitan dengan kerja sama usaha karena untuk tahap mengembangkan produk kopi yang di buat BUMDes ini masih sulit untuk dijangkau. Informasi mengenai laporan keuangan yang dibuat BUMDes Maskumambang sudah diberikan kepada stakeholder untuk mendapatkan sumber dana awal guna membangun BUMDes ini dan berguna bagi perkembangan BUMDes.

Tabel 1 Standar Akuntabilitas

Standar Akuntabilitas	Keterangan	Sudah / Belum Terlaksana & Alasan
1. Perspektif Akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya finansial • Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan • Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas 	<ul style="list-style-type: none"> → Sudah terlaksana, karena BUMDes Maskumambang mendapatkan sumber dana dari pemerintah. → Belum terlaksana, karena adanya program yang belum bisa dilaksanakan → Belum terlaksana, karena masih ada tujuan yang belum tercapai
2. Perspektif Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> • Probity and legality accountability (Pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan perundang-undangan). • Process accountability (Melihat proses-ukuran dalam melaksanakan, prosedur). • Performance accountability (Menganalisis kegiatan dalam hal efisien). • Program accountability (Penetapan dan pencapaian tujuan yang telah direncanakan). • Policy accountability (Pemilihan kebijakan yang akan diterapkan). 	<ul style="list-style-type: none"> → Sudah terlaksana, karena adanya transparansi yang digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban. → Sudah terlaksana, karena BUMDes sudah mulai berjalan dengan baik untuk masa depan → Belum terlaksana sepenuhnya, karena masih terdapat program yang belum terlaksana secara tepat waktu sehingga belum dapat dikatakan dalam hal efisien. → Belum terlaksana sepenuhnya, karena adanya kendala seperti program kerja yang belum dapat dicapai. → Pemilihan kebijakan yang diterapkan sudah terlaksana dan berjalan secara efisien.
3. Perspektif Sistem Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus pada hasil • Indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja • Informasi laporan keuangan berguna untuk pengambilan keputusan atas suatu program atau kebijakan • Menghasilkan data secara konsisten • Mempublikasikan hasil secara teratur 	<ul style="list-style-type: none"> → BUMDes ini sudah fokus pada hasil yang akan dicapai sesuai dengan rencana yang telah dibuat. → Indikator yang dipilih yaitu kualitas kerja dan pencapaian program kerja yang telah direncanakan. → Laporan keuangan sangat berguna bagi BUMDes ini untuk pengambilan keputusan, perencanaan program kedepan, serta

menerapkan kebijakan.

- Data berupa laporan keuangan telah dibuat secara konsisten yaitu dengan mencatat transaksi yang terjadi dan dilakukannya pembukuan dalam jangka waktu per bulan.
- Pemberitahuan akan perkembangan BUMDes serta transparansi laporan keuangan sudah dilaksanakan secara teratur per bulan.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya beberapa kendala yang dialami BUMDes Maskumambang, dipengaruhi oleh faktor pengetahuan mengenai akuntansi dalam melakukan pembukuan pengelolaan keuangan BUMDes yang masih kurang. Mengenai hal ini masih ada sebagian besar program di BUMDes Maskumambang belum terlaksana, dengan adanya program yang telah direncanakan dan sebagian belum terlaksana maka akan mempengaruhi laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut belum bisa sepenuhnya memberikan laporan yang utuh, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, seperti masyarakat dan beberapa pihak terkait lainnya. Karena pengelolaan keuangan yang baik dapat menjadikan perihal untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BUMDes, karena dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel, masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana pemerintah desa yang disalurkan kepada BUMDes dengan jelas.

Akuntabilitas pelaporan keuangan sangatlah penting bagi pihak internal dan eksternal organisasi dikarenakan akuntabilitas pelaporan keuangan merupakan sebuah bukti pertanggungjawaban laporan keuangan apakah laporan keuangan tersebut mengalami kondisi yang konsisten, mengalami penurunan, atau mengalami ketidakseimbangan. Dengan adanya pembuatan laporan keuangan yang lengkap dan sesuai dengan SAK ETAP mulai dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, serta jurnal penutup maka akan mempermudah pihak BUMDes dari segi laporan keuangannya yang bisa digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes kepada pemerintah dan masyarakat daerah setempat, serta bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan BUMDes masa kini dan masa yang akan datang.

Rekomendasi yang dapat peneliti berikan yaitu agar pihak BUMDes Maskumambang dapat meningkatkan laba atau pendapatan BUMDes sehingga program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik, sehingga laporan keuangan yang dibuat dari pihak BUMDes bisa secara utuh dan lengkap untuk bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak yang bersangkutan. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan mengenai akuntabilitas laporan keuangan yang bermanfaat bagi pihak BUMDes sebagai bentuk evaluasi dan acuan dalam memperbaiki pengelolaan laporan keuangan yang optimal. Sehingga dapat memberikan laporan keuangan yang disajikan secara akuntabel akan memiliki kepercayaan dari semua pihak dan bisa dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan guna pengambilan keputusan di masa mendatang dalam mengelola BUMDes menjadi lebih baik lagi. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan teknik analisis yang berbeda dan dapat melakukan kegiatan

observasi tambahan agar objek dapat diteliti secara cermat dan data yang diperoleh lebih akurat atau terbukti.

Daftar Referensi

Ayu Ariski, N., & Asim Asy, M. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa "Jaya Tirta."

Deke, D. (2019). Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa(BUMDES) (Studi Kasus Di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu) SKRIPSI Oleh.

Handayani. (2020). CFP pedoman-tata-kelola-bundes.

Hanifah, N., & Rosikhoturrofifah. (2021). Pengetahuan Akuntansi Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Sebagai Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 6. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1608>

Kirendya. (2017). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Studi Fenomena Pada BUMDes Tanjung Raya Desa Boyan Tanjung.

Mahmudah, S. (2019). Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus : BUMDes Desa Sungon Legowo Bungah Gresik).

Purba, S., Nainggolan, A., & Telaumbanua, A. G. (2021). Analisi Akuntabilitas Manajemen Keuangan BUMDes Famohouni Di Kabupaten Madura Kecamatan Gunungsitoli. In Kewirausahaan dan Bisnis (Vol. 188, Issue 2). <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/KURS/index>

Puspitasari, M. A. (2020). Identifikasi Risiko Dalam pengelolaan Keuangan Di BUMDes Maskumambang Desa Kemambang Kecamatan Banyubiru (Vol. 8, Issue 1).

Rindi, K., Putu, L., Sintia, M., Dewi, A., Ari, D., Sari, P., & Awitiana, P. (2017). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada BUMDes Teja Kusuma. Jurnal Ilmiah Akuntansi DanHumanika, 7(1).

Setiawan, A., Zaki SAg, H., & Yudi Armansyah SThI, Ma. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sungang Kecamatan Senyereng Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Syah, B. A. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Kinerja Sektor Publik.

Widhianingtyas, Y., Damayanti, A. E., Novenda, M., Anggari, G., Alessandro, C., Theresia, N., Damayanti, W., Kristanto, A. B., Ocsa, S., Saian, N., Ekonomika, F., Bisnis, D., Kristen, U., & Wacana, S. (2018). Mengawal Implementasi Pembukuan Berjenjang BUMDes Maskumambang.

Wulandari, R. (2021). Akuntabilitas Penatausahaan Keuangan Dan Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan.